

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya

Syamsul Bahri

Universitas Widyagama Malang

Abstract: Corruption has been widely discussed in many form. Public budget (APBD) corruption is abuse action public budget to private or their groups interest. Many factor caused corruption, about: individual behaviour, government organization, law enforcement, and controlling. The objective of this study are to obtain empirical evidences and to test factors that effect APBD corruption in Malang Raya. The hypothesis are tested using the partial regression and multiple regression. The sample in this research are Civil Organization such as NGO, public figure, public organization, student, academic ect, amount 165 respondent. The result of study show that as partial individual behaviour not significant effect, government organization significant effect, law enforcement significant effect, and controlling significant to APBD corruption occurred. The test used multiple regression support test used partioan regression.

Keywords: Individual Behaviour, Government Organization, Low Enforcement, Controlling, APBD Corruption, and Modus APBD Corruption.

Seiring gelombang otonomi daerah, ada beberapa perubahan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif, Pertama, eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal; dan kedua, anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak terbatas hanya dalam berwenang membuat undang-undang, tetapi juga pengawasan, investigasi, dan bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak dilakukan. Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan anggaran ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003).

Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Di

samping itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*), prinsip efisiensi dan efektif (*Value For Money*), keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2003).

Namun *euforia* otonomi daerah ternyata banyak memunculkan dampak negatif. Menurut Khudori (2004) salah satu yang menonjol adalah munculnya "Kejahatan institusional". Baik eksekutif maupun legislatif seringkali membuat peraturan yang tidak sesuai dengan logika kebijakan publik. Jika kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif dimana legislatif yang semestinya mengawasi kinerja eksekutif justru ikut bermain dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara yang "legal". "Legal" karena dilegitimasi dengan keputusan.

Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi Vampir state karena hampir semua infra dan supra struktural politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi samapai detik ini hanyalah dijadikan komoditas politik bagi elit politik,

Alamat Korespondensi:

Syamsul Bahri, Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang
Jl Borobudur No. 35 Malang
Telp (0341) 492282

lebih banyak pada penghancuran karakter (*character assanation*) bagi elit yang terindikasi korupsi dibanding pada proses hukum yang fair dan adil. *Law enforcement* bagi koruptor juga menjadi angin lalu, padahal tindak korupsi yang dilakukan koruptor sangatlah merugikan rakyat, Masduki (2002) dalam Klitgaard, dkk (2002).

Fenomena korupsi tersebut diatas menurut Baswir (1996) pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial dinegeri ini. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari, sebab skandal politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu.

Menurut Susanto (2001) korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi menurut De Asis (2000) adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang. Tipe korupsi yang terakhir yaitu *clientilism* (pola hubungan langganan).

Bentuk tindak pidana korupsi pada level legislatif adalah korupsi APBD untuk pos keuangan DPRD yang terjadi akhir-akhir ini kebanyakan melanggar PP 110/2000 walaupun sekarang telah diganti dengan PP 24/2004 tentang kesusukan keuangan DPRD, Kasus Kampar misalnya, sejumlah

454 anggota DPRD telah dijadikan tersangka karena telah melanggar pesangon. Di Kota Padang Sumatera Barat 43 anggota DPRD telah dijatuhi vonis karena merugikan uang negara sebanyak 10,4 M. Demikian juga DPRD Bali telah melakukan penggelapan uang Tirtayatra (persembahyangan di India) sejumlah 112 juta. Deretan kasus penyimpangan APBD juga terjadi di Jawa Timur seperti di DPRD Kota Surabaya 2,7 M, DPRD Sidoarjo 20,3 M, DPRD Tulungagung 1,6 M, DPRD Nganjuk 5,3 M, DPRD Banyuwangi 225 juta, DPRD Kota Blotar 1,5 M dan masih banyak lagi (Kompas, 8/9/04).

Demikian pula kasus korupsi APBD juga terjadi di wilayah Malang Raya yang menjadi objek penelitian. Di Kota Malang misalnya kasus sisa anggaran 2,1 M dan pesangon dewan senilai 1,7 sampai saat ini belum ada kepastian hukum sementara uang tersebut sudah masuk ke kantong anggota dewan yang terhormat. Di Kabupaten Malang penyimpangan dana APBD juga dilakukan untuk kepentingan pejabat dan keluarganya seperti penyelewengan sekwan 22,5 juta, umroh gate dan Dem-deman Mobil. Di Kota Batu *mark-up* APBD telah digunakan untuk kepentingan Pilihan Kepada Daerah (MCW, 2004).

Penelitian komprehensif mengenai berbagai tindak pidana korupsi APBD di masing-masing daerah dalam rangka memberikan pemikiran tentang tata pemerintahan lokal yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih dan bebas dari korupsi sangat diperlukan. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD) dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya?

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data penelitian yang di butuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian dan data sekunder dalam bentuk kasus korupsi APBD dan modus operandinya. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang terkait, sedang data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari *Malang Corruption Watch*, DPRD dan lain-lain.

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat, media masa, mahasiswa dan lain-lain, Pemilihan sampel berdasarkan metode acak (*random sampling*). Jumlah kuesioner yang disebar dan yang kembali ada dalam tabel 1.

Tabel 1 Pengiriman dan Tingkat Pengembalian kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarkan	300
2	Kuesioner yang kembali	180
3	Kuesioner yang tidak lengkap	15
4	Kuesioner yang diolah	165
5	<i>Respon rate (Prosentase)</i>	55%

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Malang Raya Jawa Timur yang terdiri dari 3 wilayah yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi APBD yang terjadi di wilayah Malang Raya. Korupsi APBD adalah tindak pidana yang berupa penyelewengan dana APBD untuk kepentingan individu atau kelompoknya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mark up anggaran, titipan anggaran, duplikat anggaran dan lain-lain. Sedangkan Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan. Aspek individu dan perilaku adalah penyebab korupsi yang berasal dari sikap mental seseorang yang berupa dorongan dari dalam dirinya. Aspek organisasi pemerintahan adalah penyebab korupsi yang berasal dari buruknya sistem organisasi pemerintahan termasuk sistem birokrasinya. Aspek perundang-undangan adalah penyebab korupsi yang berasal dari lemahnya sistem perundang-undangan yang ada. Aspek pengawasan adalah penyebab korupsi karena minimnya atau bahkan tidak adanya pengawasan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *multiple regression*, yaitu berdasarkan nilai p-value, nilai t, nilai f dan kemudian juga akan dianalisis koefisien regresi dan koefisien determinasi. Untuk menganalisis data, digunakan software SPSS for window released 12 *Program*. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Korupsi APBD

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien regresi

X_1 : Aspek perilaku individu

X_2 : Aspek organisasi pemerintahan

X_3 : Aspek peraturan perundang-undangan

X_4 : Aspek pengawasan

ε : Variabel lain yang tidak diteliti

Sementara untuk menjawab permasalahan penelitian yang kedua metode analisis yang digunakan adalah mentabulasi dan mendiskripsikan berbagai kasus korupsi APBD serta modus operandinya yang terjadi lima tahun terakhir di wilayah Malang Raya. Hasil analisa regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa aspek organisasi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,00. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0,27, artinya semakin baik aspek organisasi pemerintahan maka korupsi APBD akan menurun. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 4,64, dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,98) artinya hipotesis kedua didukung. Dilihat dari F hitung sebesar 21,61 sedangkan F tabel sebesar 2,37, sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,00 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek organisasi pemerintahan terhadap korupsi APBD. Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh aspek organisasi pemerintahan terhadap terjadinya korupsi APBD sebesar 11,7% artinya dari 100% faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi APBD 11,75% dipengaruhi oleh aspek organisasi pemerintahan.

Tabel 2 Hasil Regresi Hipotesis Ketiga

No	Keterangan	n	R ²	F	Sig	Koef.	t-value	p-value
1	Sampel	165	17,8	35,24	0,00			
	Konstanta					3,00	17,48	0,00
	Aspek Peraturan Per UU-an					0,25	5,93	0,00

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa aspek perundang-undangan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,00. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0,25, artinya semakin berkualitas sistem perundang-undangan maka korupsi akan semakin rendah, Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 5,93, dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (1,98), artinya hipotesis pertama didukung. Dilihat dari F hitung sebesar 35,24 sedang F tabel sebesar 2,37, sehingga F hitung > dari F tabel sementara nilai sig sebesar 0,00 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek perundang-undangan terhadap korupsi APBD. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh aspek perundang-undangan terhadap terjadinya korupsi APBD sebesar 17,8%. Artinya dari 100% faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi 17,8% dipengaruhi oleh berkualitas tidaknya sebuah sistem perundang-undangan.

Tabel 3 Hasil Regresi Hipotesis Keempat

No	Keterangan	a	R ²	F	Sig	Koef.	t-value	p-value
1	Sampel	165	27	60,25	0,00			
	Konstanta					2,82	18,12	0,00
	Aspek Pengawasan					0,30	7,76	0,00

Hasil analisis regresi keempat dapat dilihat bahwa aspek pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,00. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0,30, artinya semakin tinggi pengawasan maka korupsi APBD akan semakin rendah. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 7,76, dimana t hitung ini lebih besar dari

t tabel (1,98), artinya hipotesis keempat didukung. Dilihat dari F hitung sebesar 60,25 sedangkan F tabel sebesar 2,37, sehingga F hitung > dari tabel, sementara nilai sig sebesar 0,00 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek pengawasan terhadap variabel korupsi APBD. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh aspek pengawasan terhadap terjadinya korupsi APBD sebesar 27%, Artinya dari 100% faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terjadinya korupsi 27% disebabkan lemahnya pengawasan.

Tabel 4 Hasil Multipel Regresi

No	Keterangan	a	R2	F	Sig	Koef	t-value	p-value
	Sampel Konstanta	165	32,4	19,13	0,00	2,18	7,57	0,00
1	Aspek perilaku individu					-0,01	-2,62	0,79
2	Aspek organisasi kepem					0,18	3,30	0,01
3	Aspek Peraturan Per UU-an					1,98	3,03	0,03
4	Aspek Pengawasan					0,26	4,934	0,00

Hasil analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel aspek perilaku individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD di Malang Raya dengan melihat taraf signifikasinya yaitu sebesar 0,00. Hasil analisis simultan mendukung analisis secara partial. Dilihat dari F hitung sebesar 19,13 sedangkan F tabel sebesar 2,37, sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,00 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel aspek pengawasan terhadap variabel korupsi APBD. Dilihat dari koefisien determinasinya, pengaruh aspek individu, aspek organisasi pemerintahan, aspek perundang-undangan dan aspek pengawasan secara bersama-sama sebesar 32,4%. Hal ini berbeda jika menggunakan analisis regresi partial.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ada beberapa modus kejahatan korupsi di APBD. Pertama, penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud "menyembunyikan" nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada. Modus kedua, menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam PP 110/2000. Modus ketiga, mark up anggaran dengan melebihkan berbagai tunjangan anggota dewan yang telah diatur dalam PP 110/2000. Modus keempat, pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lain. Modus kelima, pembuat anggaran tanpa perincian, Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi, Modus keenam, menghilangkan pos anggaran. Modus ketujuh, pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi dalam bentuk uang. Secara umum menurut penulis terdapat empat Modus korupsi DPRD dapat ditemui hampir di semua kasus. Modus pertama adalah dengan menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan atau yang sering disebut sebagai mark-up. Dikatakan sebagai mark-up karena PP110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD sebenarnya telah membatasi secara rinci penerimaan bagi anggota dewan yang dapat ditoleransi sesuai dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Modus kedua adalah menggandakan (*redundant*) item penerimaan anggota dewan melalui berbagai strategi. Strategi yang sering digunakan adalah memasukan item anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi. Modus ketiga adalah dengan cara mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam PP110/2000. Kasus yang paling mencuat adalah adanya pos purna tugas bagi anggota dewan. Modus keempat adalah korupsi da-

lam pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Dari keempat Modus korup tersebut, modus keempat bisa dianggap paling konvensional dan umum terjadi diberbagai instansi pemerintahan.

Seperti dijelaskan dalam usulan penelitian bahwa modus korupsi APBD di Malang Raya akan dipaparkan menyajikan data sekunder mengenai berbagai indikasi kasus korupsi APBD yang terjadi mulai lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil tebulasi terjadinya korupsi minimal terdapat 140 kasus korupsi di Malang Raya dengan 7 modus korupsi. Kasus korupsi terbanyak di kota Malang 77 kasus, kemudian di Kabupaten Malang 45 kasus, dan di Kota Batu ada 18 kasus.

dap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukan adalah negatif artinya semakin berkualitas peraturan perundang-undangannya maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Keempat, aspek pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang di tunjukan adalah negatif artinya semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Sementara hasil analisis secara simultan mendukung hasil analisis secara partial, artinya secara bersama-sama faktor individu perilaku, organisasi pemerintahan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD. Sedangkan jumlah kasus korupsi

Tabel 5 Modus Korupsi APBD

No	Modus korupsi	Kota Malang		Kab Malang		Kota Batu		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Menyembunyikan Anggaran	10	13	7	16	2	11	19	14
2	Menciptakan anggaran baru	14	18	6	13	3	17	23	17
3	Mark-up Anggaran	22	29	12	27	5	28	39	28
4	Pengalokasian Anggaran yg sama	6	8	4	9	2	11	12	9
5	Anggaran tanpa rincian	12	15	8	18	2	11	22	16
6	Menghilangkan Pos Anggaran	7	9	5	11	3	17	15	10
7	Pengalihan Anggaran	6	8	3	6	1	5	10	7
		77	100	45	100	18	100	140	100

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, aspek perilaku individu tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Kedua, aspek organisasi pemerintahan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya korupsi APBD. Hubungan yang ditunjukkan adalah negatif artinya semakin baik organisasi pemerintahan maka semakin rendah korupsi APBD yang terjadi. Ketiga, aspek peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terha-

APBD di Malang Raya ada 140 kasus dengan 7 modus korupsi APBD.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan lebih spesifik mengenai korupsi APBD. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas kepada masyarakat. Diharapkan sampel yang diambil adalah benar-benar mewakili pendapat masyarakat yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pemberantasan ko-

rupsi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pola-pola atau modus korupsi APBD, dampak-dampak korupsi APBD, serta strategi pemberantasan korupsi APBD. Selain analisis, penelitian ini juga bisa dikembangkan ke dalam berbagai model penelitian korelasional yang berpengaruh terhadap korupsi APBD, seperti partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, *performance budget*, disiplin anggaran, *value for money*, keadilan anggaran, anggaran peka gender dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardyanto. Donny. 2002. *Korupsi di sektor pelayanan Publik* dalam Basyaib. H..dkk. (ed.) 2002. *Mencuri Uang rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia*. Buku 2. Jakarta: Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform.
- Baswir Revrison. 1993. *Ekonomi, Manusia dan etika*. kumpulan Esai-esai terpilih. Yogyakarta: BPFE.
- . 1996. *Ekonomi Politik Kesenjangan. Konglomerasi. dan Korupsi di Indonesia*. dalam buku *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan rakyat*. Yogyakarta: BPFE.
- Basyaib. H.. Holloway R.. dan Makarin NA. (ed.) 202. *Mencuri Uang rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia*. Buku 3. Jakarta: Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform.
- Bernardi R.A. 1994. *Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 13 (Supplement)
- De Asis. Maria Gonzales. *Coation-Building to Fight Corruption*. *Peper Prepared for the Anti-Corruption Summit*. World Bank Institute. November 2000.
- Fadjar. A. Mukti. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam Pengantar Kurniawan. L.. 2002. *Menyikap Korupsi di Daerah*. Instansi Malang.
- Halim. Abdul. 2003. *Bunga Rampai keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Haryadi. Dedi. 2004. *Modus Korupsi Anggaran Rakyat (APBD)*. <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0204/17/0807.htm>
- Helmi. dkk. 2003. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hermien H.K.. 1994. *Korupsi di Indonesia: dari delik jabatan ke tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaiser. H. Dan Rice. J.. 1974. *Education and Psycological Measurement*. Volume 34. No.1. hal 111-117.
- Khudori. Politik Anggaran Publik. *PikiranRakyat*. Rabu. 04 Februari 2004.
- Klitgaard. dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Patnership for Governance in Indonesia.
- Malang Corruption Watch. 2004. *Laporan investigasi Kasus APBD Malang Raya*. tidak diterbitkan.
- Mardiasmo. 2003. *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*. *Majalah Swara MEP*. Vol.3 No.8 Maret. Yogyakarta: MEP UGM.
- Peraturan perundang-undangan Nomor 110 tahun 2000 dan 24 tahun 2004*.
- Saptaatmaja. TS. *Korupsi dan Hipokrisi*. *Kompas*. Rabu. 8 September 2004.
- Sulistyantoro. HT. *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*. *Kompas*. Senis. 2 Agustus 2004.
- Susanto. AA. 2002. *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah*. <http://www.transparansi.or.id/artikelpk/artikel15.html>

- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W. 2000. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.
- Tanzi. Vito. 1998. *Corruption Around the World: Cause. Consequences. Scope. and Cures. IMF Working Paper*. WP/98/63. May 1998.